

**HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA DAN TIONGKOK
PASCA PENAMAAN LAUT NATUNA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*



Oleh :

**Tania
1810851007**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara. Setelah Indonesia diketahui melakukan penamaan Laut Natuna Utara pada Juli 2017, Tiongkok mengirimkan surat protes dengan menyatakan bahwa tindakan Indonesia mengganggu stabilitas hubungan bilateral antar kedua negara. Data yang diperoleh peneliti dari situs Badan Pusat Statistik (BPS), nilai investasi asing Tiongkok di Indonesia menurun pada tahun 2018. Untuk melihat bagaimana hubungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pasca penamaan Laut Natuna Utara, penelitian ini menggunakan konsep *complex interdependence* yang terdiri dari tiga kategori yakni *multiple channels*, tidak ada hierarki diantara isu, peran angkatan militer yang kecil. dengan jenis penelitian kualitatif dan analisis deskriptif Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memperbaiki kebijakan regulasi penanaman modal asing agar kembali meningkat yang mana hal ini dipengaruhi dari adanya *multiple channels* atau aktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Indonesia dan Tiongkok juga memiliki isu lain yang lebih diperhatikan selain permasalahan di Laut Natuna Utara, terlihat bahwa isu utama di setiap negara itu berbeda-beda. Penelitian ini juga menemukan bahwa Indonesia dan Tiongkok memilih memperbanyak kerjasama ekonomi dari pada menggunakan kekuatan militer dalam penyelesaian isu Laut Natuna Utara.

Kata kunci: hubungan ekonomi, Indonesia, kerjasama, Laut Natuna Utara, Tiongkok

ABSTRACT

This research aims to explain and analyze the economic relationship between Indonesia and China post-naming of the North Natuna Sea. Following Indonesia's decision to name the North Natuna Sea in July 2017, China lodged a protest letter, stating that Indonesia's action disrupted the stability of the bilateral relationship between the two countries. Data acquired from the Indonesian Badan Pusat Statistik (BPS) indicates a decrease in China's foreign investment in Indonesia in 2018. To examine the economic relationship between Indonesia and China post-naming of the North Natuna Sea, this research utilizes the concept of complex interdependence, which consists of three categories: multiple channels, no hierarchy among issues, and a small role of military forces. Employing qualitative research methods and descriptive analysis, this research finds that Indonesia improved its foreign investment regulation policies to stimulate an increase, influenced by the presence of multiple channels or other actors affecting decision-making. Indonesia and China also have other issues to address aside from those in the North Natuna Sea, indicating that each country has different main issues. Furthermore, this research finds that Indonesia and China prioritize increasing economic cooperation rather than resorting to military force to resolve issues in the North Natuna Sea.

Keywords:; China, cooperation, economic relationship, Indonesia, North Natuna Sea.